

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam pengelolaan informasi dan proses pengambilan keputusan (Nuryana et al., 2024). Perkembangan ini mendorong perubahan dalam cara pengelolaan data dan informasi menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi. Transformasi teknologi juga mendorong berbagai sektor untuk beradaptasi dengan sistem berbasis digital guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung kemajuan sistem di berbagai bidang.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Marasabessy et al., 2025). Penerapannya di berbagai instansi pemerintah menunjukkan komitmen terhadap prinsip *good governance* melalui layanan publik berbasis digital. SPBE diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat administrasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data terintegrasi.

Dalam mendukung pelaksanaan SPBE, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengintegrasikan data pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah dalam satu platform nasional. Pengembangan SIPD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan regulasi baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sebelumnya menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIPD diharapkan mengatasi data daerah yang sebelumnya bersifat lokal dan belum terintegrasi dengan pusat sehingga mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel (Mariana & Pandoyo, 2024).

Sebagai sistem yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, keberhasilan penerapan SIPD tidak hanya ditentukan oleh kualitas sistem yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai sumber daya pendukung. Kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dukungan kebijakan organisasi, serta pelatihan bagi pengguna menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penggunaan SIPD. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, tujuan implementasi SIPD untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah akan sulit tercapai secara optimal.

Selain kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan SIPD juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Meskipun SIPD telah diterapkan di berbagai pemerintah daerah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Menurut penelitian Balqis et al. (2021) yang dilakukan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat mengalami hambatan berupa belum adanya kejelasan standar operasional prosedur dan pembagian tugas yang jelas. Menurut penelitian Pramana et al. (2023) yang dilakukan pada BPKAD Kabupaten Nganjuk, penerapan SIPD masih memiliki kelemahan atau kendala dalam penerapannya, diantaranya adalah kurang efektif dan efisien, dan masih perlu didampingi oleh sistem yang lain. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaksanaan SIPD masih memerlukan perhatian dan evaluasi untuk mengetahui berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penggunaannya.

Keberhasilan implementasi SIPD pada akhirnya dapat dilihat dari hasil yang diperoleh setelah sistem digunakan. SIPD diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, terintegrasi, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyusunan laporan keuangan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan penerapan SIPD.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memastikan program, kebijakan, maupun sistem yang diterapkan telah berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam konteks pemerintahan berbasis elektronik, evaluasi diperlukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kualitas sistem informasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (Setiawan et al., 2023). Melalui evaluasi, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala, kelemahan, maupun peluang perbaikan agar sistem yang diterapkan dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. Penelitian mengenai efektivitas penerapan SIPD menunjukkan bahwa meskipun sistem ini mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakstabilan server, fitur sistem yang belum optimal, dan kompetensi sumber daya manusia yang belum merata (Setiyani, 2025). Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan penerapan SIPD dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan observasi awal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes, SIPD sudah mulai diterapkan di tahun 2019 untuk bagian penganggaran, sedangkan penatausahaan di tahun 2021. Namun untuk bagian akuntansi pelaporan, SIPD baru diterapkan di tahun 2024. Dalam penerapan SIPD pada bagian akuntansi pelaporan, masih

terdapat keraguan dalam penggunaan sistem tersebut dikarenakan masih terbatasnya menu dan fitur dalam sistem yang belum tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Selain itu, pengguna masih menghadapi kendala *server down*, perbedaan format keluaran laporan, dan kebiasaan koreksi manual di *Excel* sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu evaluasi yang komprehensif untuk menilai pelaksanaan SIPD di BPKAD Kabupaten Brebes. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis *PIECES*. Metode *PIECES* digunakan untuk menilai berbagai aspek penting dalam sistem informasi. *PIECES* terdiri dari *Performance* (Kinerja), *Information* (Informasi), *Economy* (Ekonomi), *Control* (Pengendalian), *Efficiency* (Efisiensi), dan *Service* (Pelayanan) untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan SIPD serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung optimalisasi penggunaan sistem di masa mendatang agar laporan keuangan daerah menjadi lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana Evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes?".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memerlukannya, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai penerapan dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini menjadi media untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah khususnya dalam konteks sistem informasi akuntansi.

2. Bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes
 - a. Sebagai sarana untuk memperkuat hubungan baik antara instansi dengan Universitas Harkat Negeri, khususnya Program Studi D3 Akuntansi.
 - b. Membangun kerja sama yang memberikan manfaat timbal balik bagi pihak-pihak yang terlibat.
3. Bagi Universitas Harkat Negeri
 - a. Dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.
 - b. Dapat menjadi sumber pengetahuan atau gambaran akademis mengenai penerapan dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

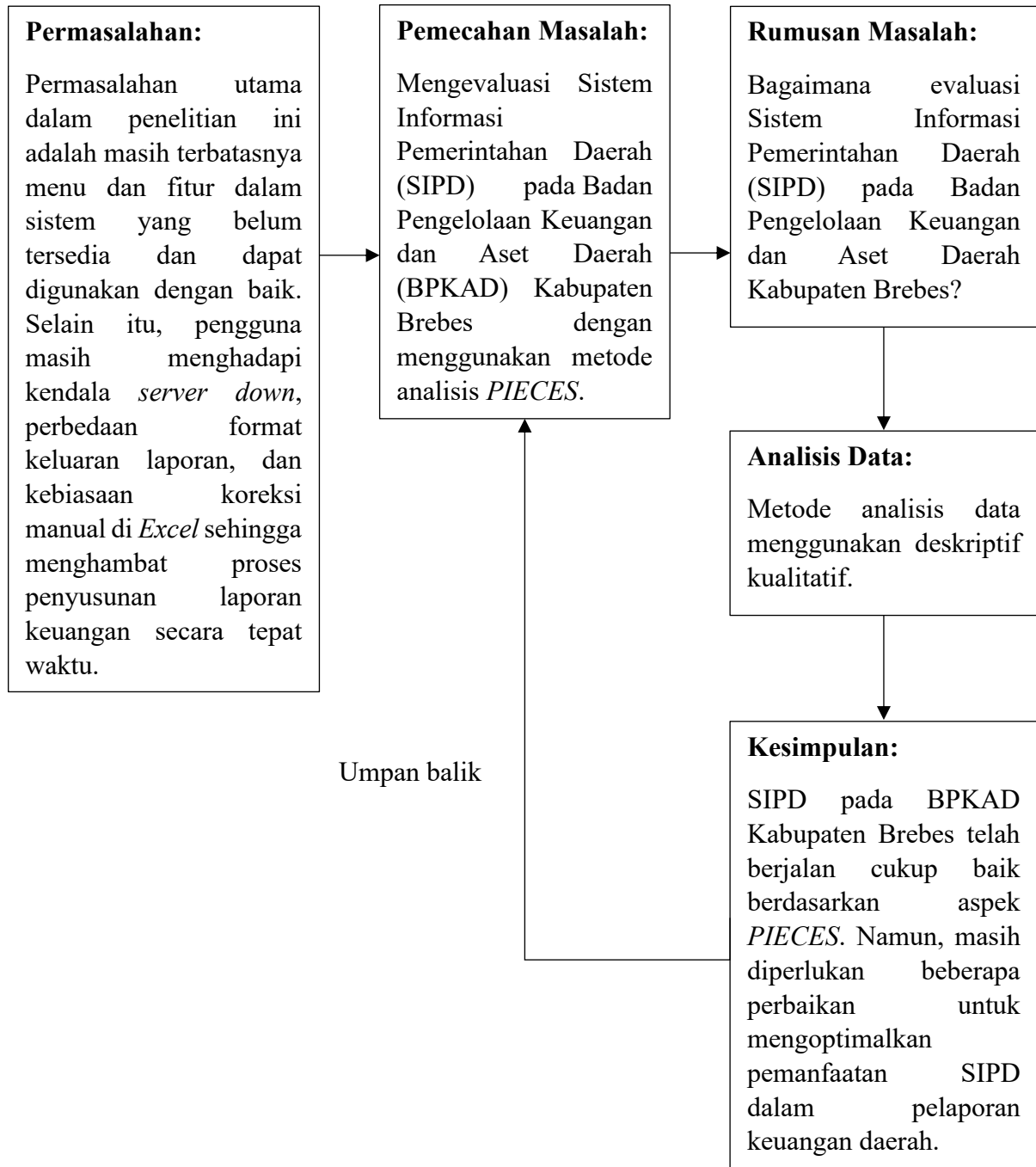
1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya mengevaluasi kelemahan dan kelebihan yang terdapat pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) khususnya dalam penyusunan laporan keuangan di Bidang Akuntansi Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dengan menggunakan analisis *PIECES*.

1.6 Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada evaluasi sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan pada Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD Kabupaten Brebes dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD berperan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Evaluasi menggunakan analisis *PIECES* (*Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, dan Service*) untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan SIPD serta menghasilkan rekomendasi perbaikan guna mengoptimalkan sistem pada Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD Kabupaten Brebes..

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan laporan keuangan pada Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD Kabupaten Brebes masih menghadapi beberapa kendala dan belum terlaksana secara efektif. Evaluasi terhadap SIPD pada Bidang Akuntansi Pelaporan BPKAD Kabupaten Brebes semakin penting seiring meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang cepat dan informasi keuangan yang transparan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Bagian awal berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan atas evaluasi, tinjauan atas laporan keuangan, tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi, tinjauan atas Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD), Analisis *PIECES* dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penarikan kesimpulan dan garis besar dari penelitian serta saran dari penulis yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi daftar sumber bacaan yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam penyusunan tugas akhir ini.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Pada bagian akhir terdapat lampiran yang mencakup informasi tambahan yang digunakan sebagai kelengkapan tugas akhir seperti data-data yang dibutuhkan.